



# Transfer Pricing

## Regulations and Issues

**Budi Lidson Hasiholan Lubis**  
Senior Transfer Pricing and MAP/APA Analyst



**Pramuji Handra Jadi**  
Junior Transfer Pricing and MAP/APA Analyst



# Kewajiban Wajib Pajak

	Transaksi dengan lawan transaksi:		
	Domestik	Resident of Treaty Country	Resident of Non-Treaty Country
<b>Kewenangan DJP</b>	Pasal 18 (3) UU PPh Pasal 2 (1) UU PPN Pasal 36 PP-55/2022 PMK-22/2020	Pasal 18 (3) UU PPh Pasal 9 (1) P3B Pasal 36 PP-55/2022 PMK-22/2020	Pasal 18 (3) UU PPh Pasal 36 PP-55/2022 PMK-22/2020
<b>Kewajiban WP</b>	Pasal 35 PP-55/2022 dan PMK-22/2020 – <b>Arm's Length Principle (PKKU)</b> Pasal 11 (2) PP-50/2022 dan PMK-213/2016 – <b>TP Documentation</b>		
<b>Panduan TP Doc</b>	PMK-213/PMK.03/2016 PER-29/PJ/2017		
<b>Panduan PKKU</b>	PMK-22/2020 PER-43/2010 sebagaimana diubah dengan PER-32/2011 PER-22/PJ/2013, SE-50/PJ/2013		
<b>References</b>	<i>OECD TP Guidelines, UN Practical Manual on TP and others</i>		

# Mekanisme Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa TP

## Pencegahan

### Domestik

### Unilateral APA

- Pasal 18 ayat (3a) UU PPh
- Pasal 45-47 PP-55/2022
  - PMK-22/2020
  - PER-17/2020
- Pasal 25 ayat (3) P3B

### Internasional

### Multilateral/Bilateral APA

## Penyelesaian

### Domestik

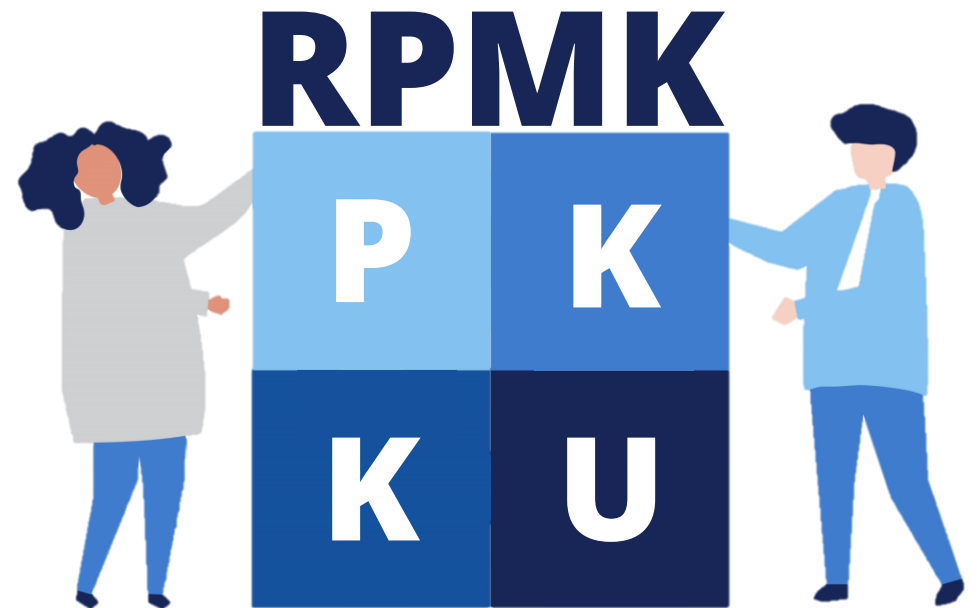
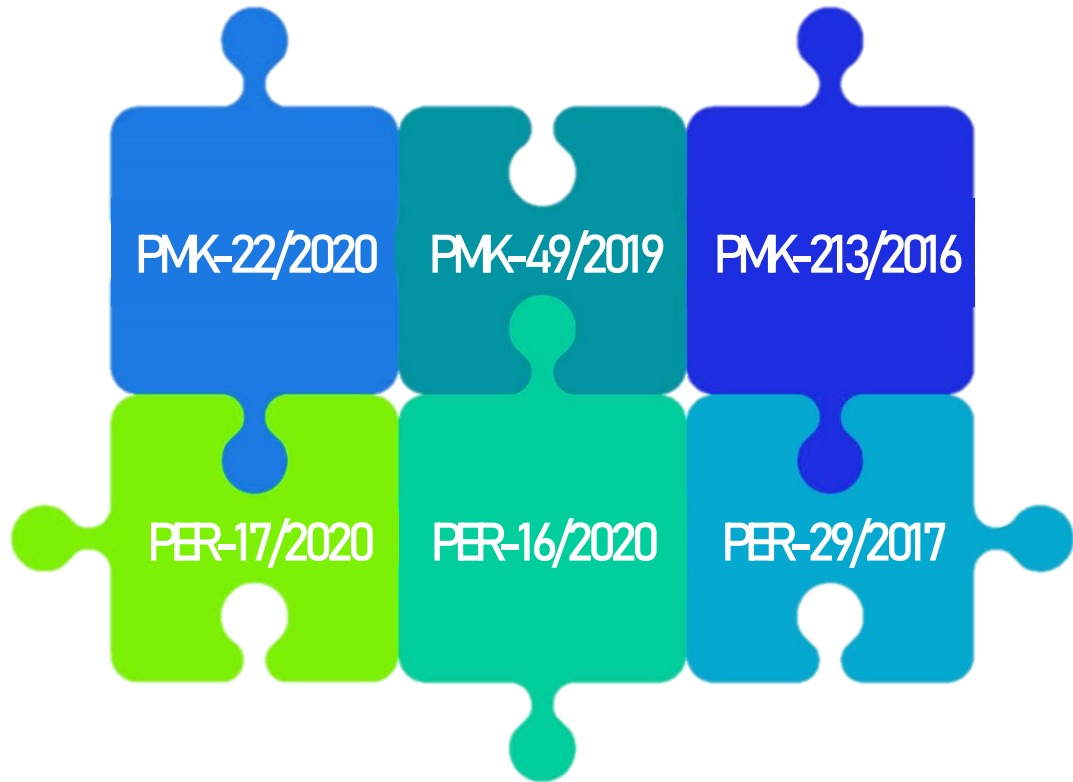
### Keberatan, Banding

### Internasional

### Mutual Agreement Procedure (MAP)

- Pasal 27C UU KUP
- Pasal 55-58 PP-50/2022
  - PMK-49/2019
  - PER-16/PJ/2020
- Pasal 25 ayat (1) P3B

# Perkembangan Peraturan TP



# Menimbang dan Mengingat

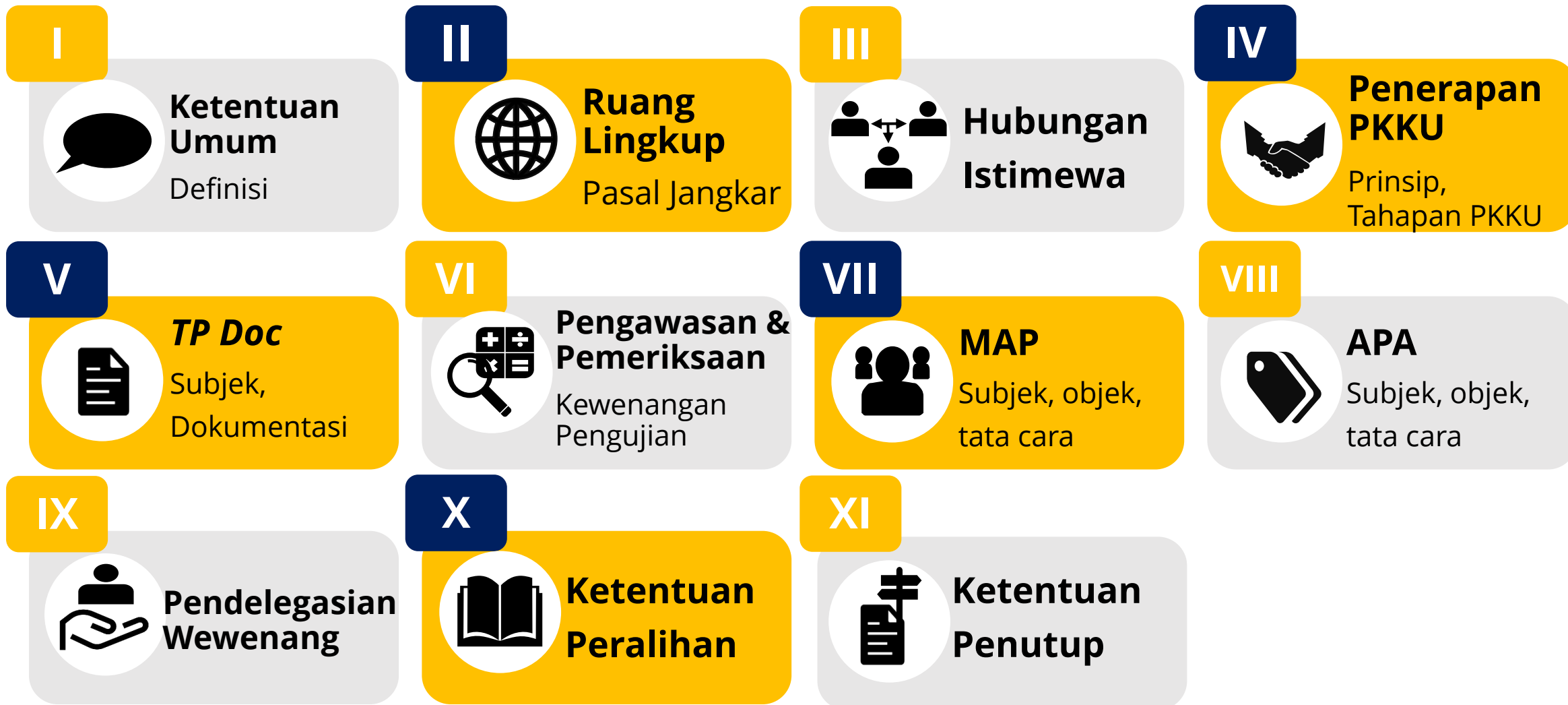
## Menimbang

- dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, diperlukan penyesuaian dan pengaturan yang komprehensif.
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 47 PP 55 Tahun 2022, Pasal 11 ayat (3) PP 50 Tahun 2022, dan Pasal 44E ayat (2) huruf d UU KUP beserta perubahannya.

## Mengingat

- Pasal 17 ayat 3 UUD 1945
- UU KUP beserta perubahannya
- UU PPh beserta perubahannya
- UU No. 17/2003
- UU No. 39/2008
- PP 50/2022
- PP 55/2022
- PP 57/2020
- PMK-118/2021

# Sistematika Penyusunan



# BAB I – Ketentuan Umum



**PKKU**

1. Harga Transfer
2. Pihak Afiliasi
3. Transaksi Afiliasi
4. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
5. Transaksi Independen
6. Penentuan Harga Transfer
7. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
8. Pemeriksaan



**APA**

23. Kesepakatan Harga Transfer
24. Naskah Kesepakatan Harga Transfer
25. Kesepakatan Harga Transfer Unilateral
26. Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral
27. Periode Kesepakatan Harga Transfer
28. Pemberlakuan Mundur
29. Surat Keputusan Kesepakatan Harga Transfer
30. Portal Wajib Pajak
31. Tanda Tangan Elektronik
32. Dokumen Elektronik



**TP Doc**

9. Dokumen Penentuan Harga Transfer
10. UU KUP
11. Wajib Pajak
12. Grup Usaha
13. Entitas Induk



**MAP**

14. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
15. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
16. Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
17. Prosedur Persetujuan Bersama
18. Pejabat Berwenang
19. Persetujuan Bersama
20. Surat Keputusan Persetujuan Bersama
21. Warga Negara Indonesia
22. Pemohon



**djp**

# BAB II – Ruang Lingkup

1

Kewajiban menetapkan **Harga Transfer wajar** sesuai PKKU



2

Kewajiban TP Doc



3

Wewenang DJP dalam hal **Harga Transfer tidak sesuai PKKU**



4

Wewenang DJP melaksanakan MAP



5

Wewenang DJP membuat **APA**





# BAB III – Hubungan Istimewa



# BAB IV – Penerapan PKKU ..... (1/2)

1

PKKU



PKKU -> harga transfer wajar



TYDHI

v s



Transaksi Independen

Kondisi sebanding = harga transfer sebanding

2

Pedoman PKKU



Konsep PKKU



Segregasi vs Agregasi



Tahap penerapan PKKU

3

Analisis Industri



Faktor-faktor analisis industri

4

Analisis atas Kondisi Transaksi



Ketentuan Kontraktual

Fungsi, Aset, Risiko



Karakteristik Produk

Kondisi Ekonomi



Strategi Bisnis

5

Analisis Kesebandingan



Konsep kesebandingan

Tahapan analisis



Konsep pihak yang diuji


Pembandingan internal vs eksternal




# BAB IV – Penerapan PKKU ..... (2/2)

## 6 Metode TP



 Jenis metode

Ketepatan, keandalan metode 

 Penjelasan metode

## 7 Nilai Indikator Harga




Harga Transfer:


- titik kewajaran,
- titik yang paling tepat dalam rentang,
- atau titik tengah

Data pembanding single vs multiple year

## 8 Tahapan Pendahuluan



 Tahapan untuk Jenis Transaksi Tertentu

 *Transaction by transaction*

## 9 PKKU untuk BUT

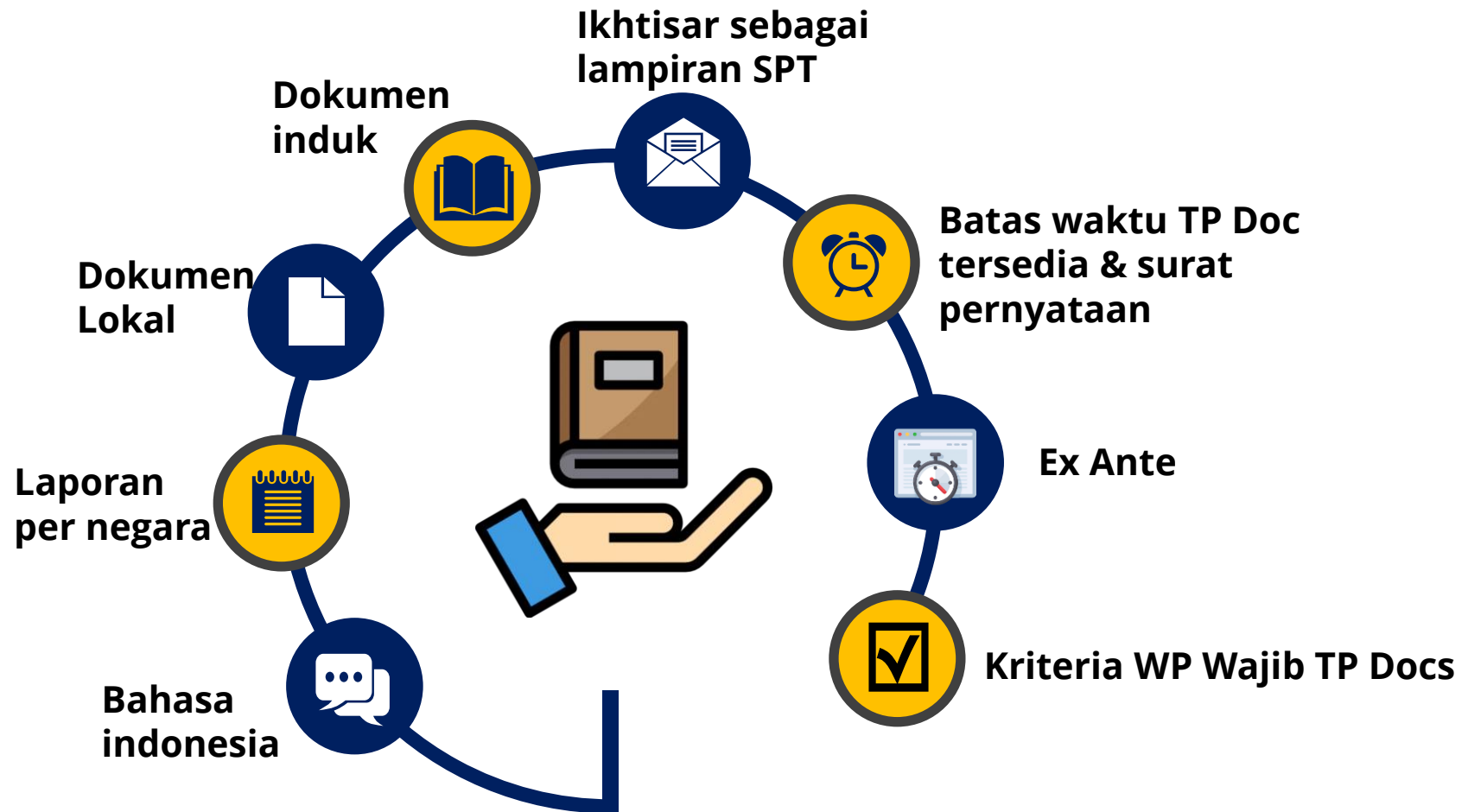


WPDN   
BUT 

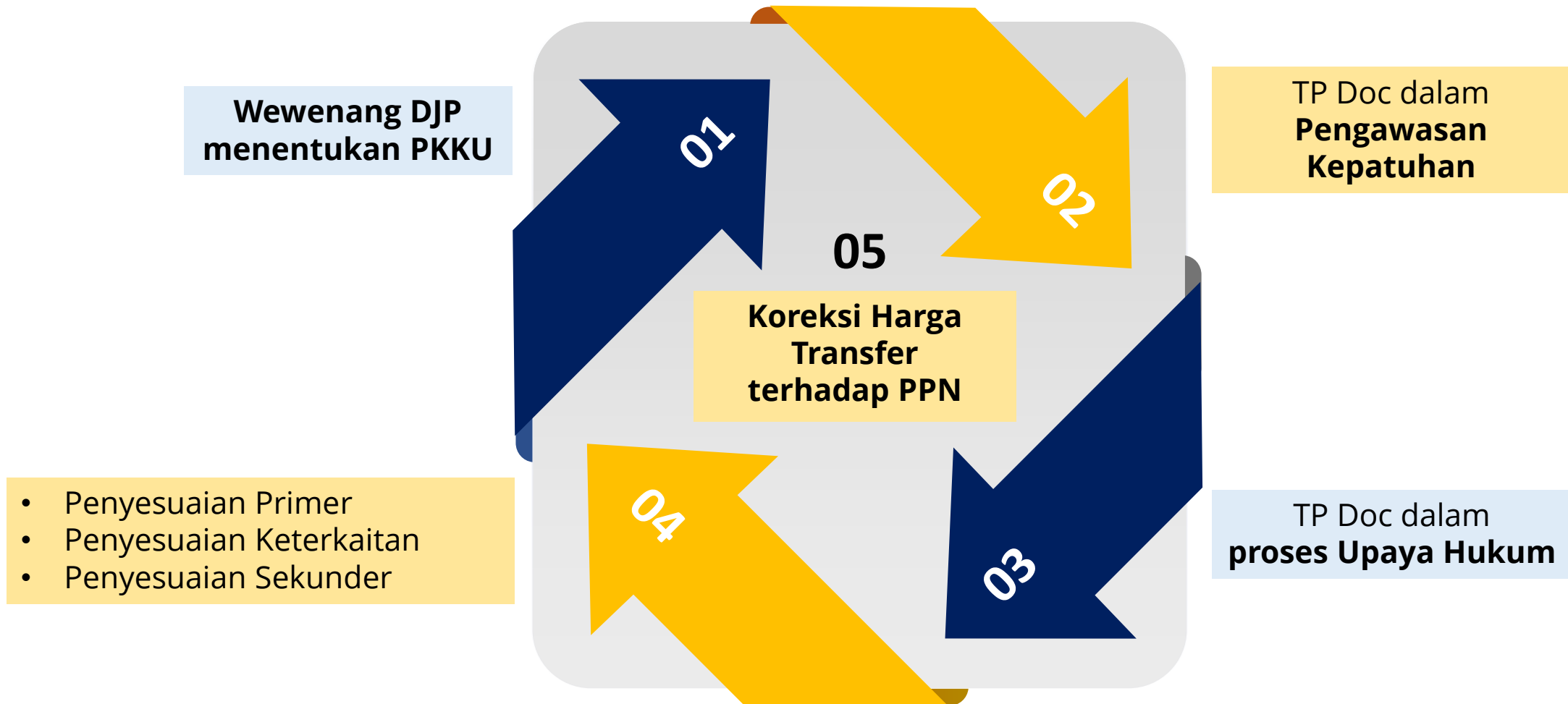


**BUT lapor data transaksi pihak afiliasi di luar negeri** terkait kegiatan BUT di Indonesia

# BAB V – Dokumentasi Penerapan PKKU (TP Doc)



# BAB VI – Pengawasan dan Pemeriksaan Penerapan PKKU



# BAB VII – Prosedur Persetujuan Bersama (MAP)



# BAB VIII - Kesepakatan Harga Transfer (APA)



# BAB IX s.d XI Pendelegasian Wewenang, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

## Pendelegasian Wewenang

Delegasi wewenang pelaksanaan MAP dan APA



## Ketentuan Penutup

- PMK 213/2016
  - PMK 49/2019
  - PMK 22/2020
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Ketentuan Peralihan

- Tindaklanjut permohonan MAP dan APA dalam masa peralihan





**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200